RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DLANGGU
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		7
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu	7
	2.2	Sumber Daya Kecamatan Dlanggu	8
	2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu	10
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dlanggu	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		15
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dlanggu	15
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3	Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN		22
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dlanggu	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		37
BAB VIII	PENUTUP		38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2024

CAMAT DLANGGU

Drs. AKHMAD SAMSUL BAKRI,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700417 199101 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Dlanggu yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

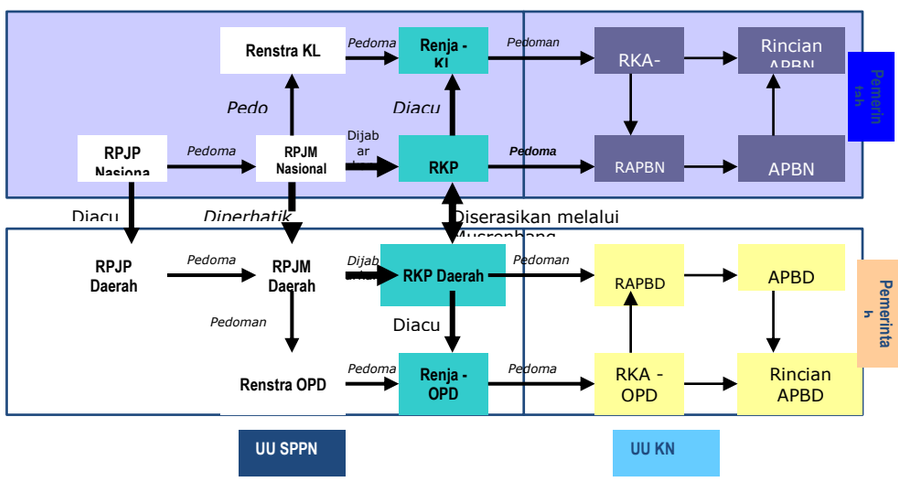
Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Dlanggu Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Dlanggu dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dlanggu. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dlanggu dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor .... Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan mis kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Dlanggu ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Dlanggu, proses penyusunan Renja Kecamatan Dlanggu, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Dlanggu dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Dlanggu.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daeraahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah

yang ada di kecamatan;

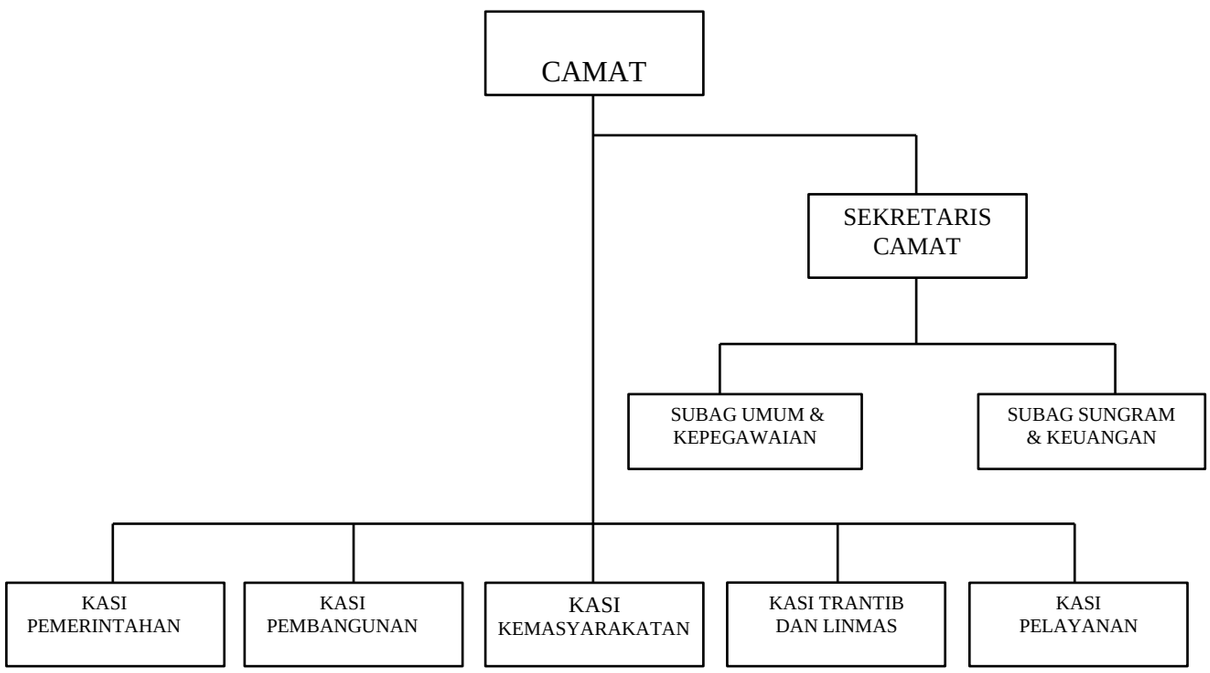
h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk

kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Dlanggu juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Dlanggu yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Dlanggu berjumlah 17 orang terdiri dari 14 PNS dan 3 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamata Dlanggu Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	Drs. Akhmad Samsul Bakri,M.Si	Camat	PNS
2	Drs. Miftakhul Huda,SP.MM	Sekretaris Kecamatan	PNS
3	Sri Astutik,S.Sos,MM.	Kasi Kemasyarakatan	PNS
4	Arju Munir,S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	PNS
5	Dwi Ariningrum ,SE	Kasi Pembangunan	PNS
6	Mujoko Hakim	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
7	Asetyo Laksana Aprilia Santi, S.IP	Kasi Pemerintahan	PNS
8	Saniatun Nihayah, SM	Kasubbag Sungram dan Keuangan	PNS
9	Shokhib	Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban	PNS
10	Suwari	Pengelola Kemanan dan Ketertiban	PNS
11	Teguh S.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	PNS
12	Arifin	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	PNS
13	Rudi K	Pengelola Data	PNS
14	Avife Fabruari, SE		Honorer
15	Arbikhan Mustaan		Honorer
16	Tri Eko Hendra Cahyono, S.Kom		Honorer
17	SIfakunnadiyah		Honorer

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 13 (Tiga belas) orang PNS dan 4 orang Honorer di Kantor Kecamatan Dlanggu dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan DLANGGU Tahun 2024

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	3 orang
2	Sarjana (S-1)	7 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	7 orang

Dari jumlah 17 personil tersebut 41% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 41% berpendidikan Sarjana, dan 17% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Dlanggu sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Dlanggu terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jl. Jendral A. Yani No. 09 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Buku Inventaris meliputi :
-

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	2 unit	
4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor	6 unit	
6	Sepeda Motor (Kades)	16 unit	
7	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	32 unit	
8	Meja pelayanan	3 unit	
9	Kursi tunggu	2 unit	
10	Rak	3 unit	
11	Almari	2 unit	
12	Papan Visual	1 unit	
13	Komputer	1 unit	
14	Laptop	10 unit	
15	Printer	12 unit	
16	Scanner	1 unit	
17	Kursi kerja Esselon	16 unit	
18	Kursi rapat esselon	4 unit	
19	Kursi kerja pelaksana	5 unit	
20	Kursi rapat	30 unit	
21	Meja rapat	13 unit	

22	Meja kerja esselon	7 unit	
23	Televisi	2 unit	
24	Pesawat Orari	1 unit	
25	Pesawat telepon	1 unit	
26	Loudspeaker	2 unit	
27	AC	6 unit	
28	Lampu hias	1 unit	
29	Proyektor	1 unit	
30	Backdrop	10 unit	
31	Kipas Angin	2 unit	
32	Barcode scaner	2 unit	
33	Finger print	1 unit	
34	Lemari Es	1 unit	
35	Sound system	1 unit	
36	Digital LED Running Text	1 unit	
37	CCTV	1 unit	
38	Logo Paten	1 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2025-2029 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Dlanggu dari tahun 2025-2029 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23

Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu 2021-2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				76	78	79				76	78	79				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							79%						79%						100%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				1,6 %	2%	1%	1%			1,6 %	(3,06%)	1%	1%						100%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	81%					79%	81%					100 %	100 %

5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat								79%	81%					79%	81%					100 %	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan DLANGGU untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan DLANGGU baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan DLANGGU Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2025

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	2.940.884.000	2.156.189.000	2.216.311.000	2.588.042.480	2.192.361.630		2.660.133.360	1.813.939.043	1.836.855.740	2.188.098.012	1.798.523.556		90,45	84,13	82,88	84,55	82,04			
Belanja Pegawai	2.270.681.000	1.915.969.000	1.882.851.000	2.113.803.000	1.749.237.150		2.022.676.060	1.584.686.870	1.520.703.819	1.732.223.153	1.374.243.640		89,08	82,71	80,77	81,95	78,56			
Belanja Barang dan Jasa	670.203.000	240.220.000	333.460.000	474.239.480	443.124.480		637.457.300	229.252.173	316.151.921	455.874.859	424.279.916		95,11	95,43	94,81	96,13	95,75			
Belanja Modal	35.000.000	10.000.000	150.450.000	50.000.000	150.800.000		35.000.000	10.000.000	147.625.000	50.000.000	150.682.500		100	100	98,12	100	99,92			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	10.000.000	150.450.000	50.000.000	150.800.000		35.000.000	10.000.000	147.625.000	50.000.000	150.682.500		100	100	98,12	100	99,92			

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Dlanggu sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal–hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Dlanggu.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
  3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Dlanggu masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
  4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
  1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
  2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.

3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DLANGGU

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dlanggu dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;

f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;

i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;

j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;

k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Perioritas dan Sarana

Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangmya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-udangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan

		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organnisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggani data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2025 – 2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2025 – 2029 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Dlanggu sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Dlanggu dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Dlanggu yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
  a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika

internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Dlanggu menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***meningkatkan kualitas pelayanan publik.*** Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 : "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan".** Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Dlanggu merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 "meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

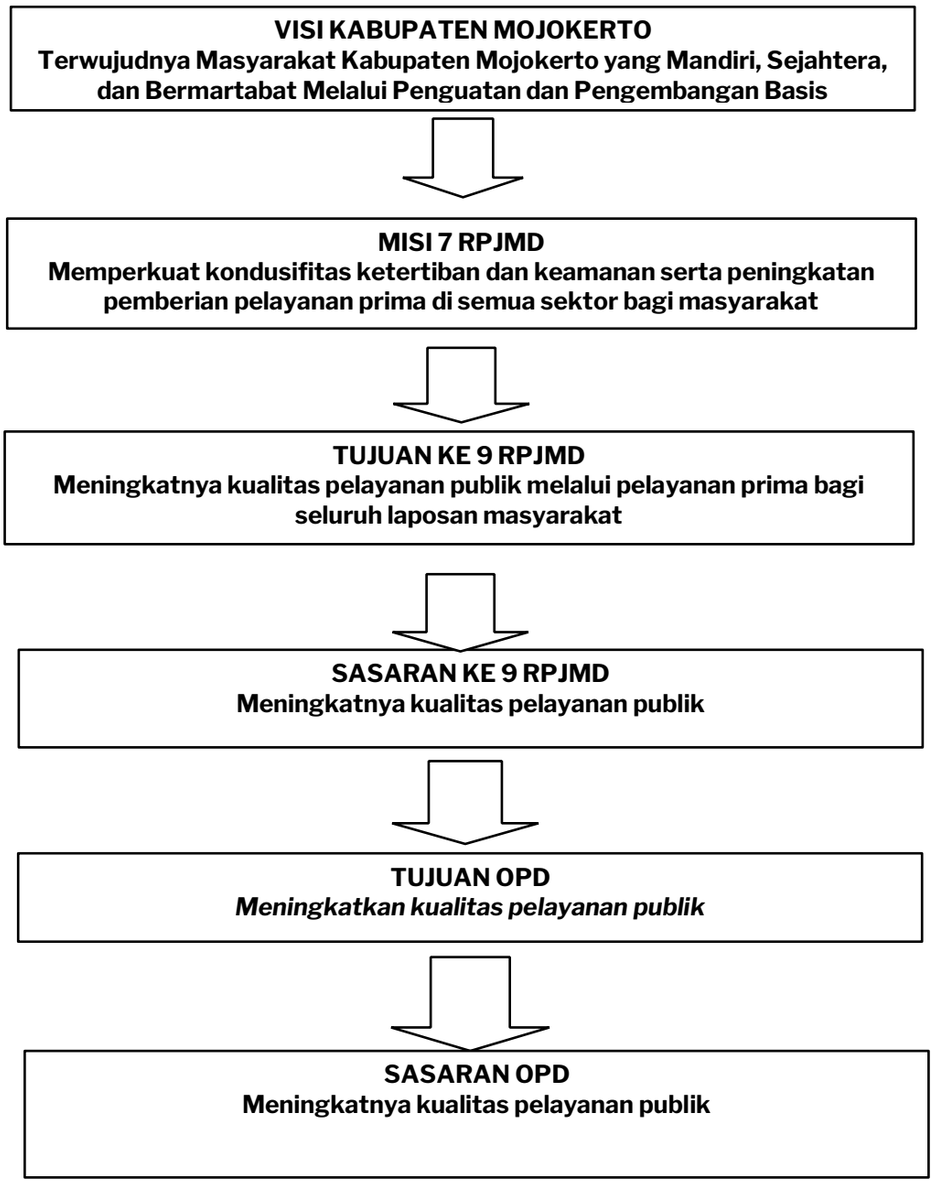
Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu, dalam hal ini Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dlanggu menetapkan **sasaran** strategis :

" Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan"

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

TabeL T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	**Tahun 1**	**Tahun 2**	**Tahun 3**	**Tahun 4**	**Tahun 5**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		93,70	93,80	93,90	94	94,10	
	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan							
	Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		3%	4%	5%	6%	7%	
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat		81%	82%	83%	84%	85%	
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Dlanggu . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Dlanggu .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">ISU STRATEGIS</td><td>KEKUATAN</td><td>WEAKNESS</td></tr>
<tr><td>Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program</td><td>Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana</td></tr>
<tr><td>Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas</td><td>Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah</td></tr>
<tr><td>Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat</td><td>Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi</td><td>Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal</td></tr>
<tr><td>Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PELUANG</td><td>Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat</td><td rowspan="2"><u>STRATEGI S-O :</u>
Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu yang efektif dan efisien</td><td rowspan="2"><u>STRATEGI W-O :</u>
Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu</td></tr>
<tr><td>Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ANCAMAN</td><td>Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah</td><td rowspan="3"><u>STRATEGI S-T:</u>
Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu</td><td rowspan="3"><u>STRATEGI W-T :</u>
Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah</td></tr>
<tr><td>Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan</td></tr>
<tr><td>Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</td></tr>
</table>

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Dlanggu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Dlanggu	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Dlanggu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Dlanggu , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Dlanggu lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

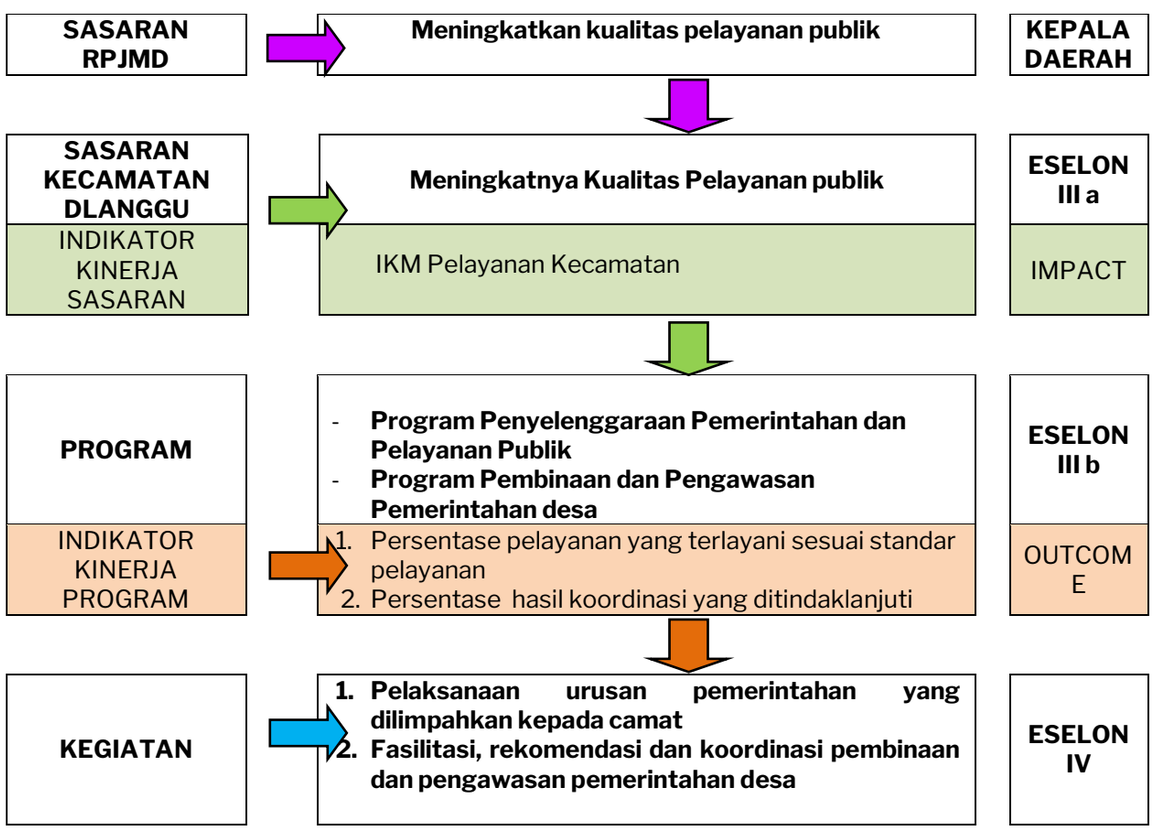
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melelui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Dlanggu
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dlanggu	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Dlanggu
			Peningkatan pembinaan kepada Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan		

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Dlanggu, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	1. Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standard pelayanan 2. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	OUTPUT

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Dlanggu ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Dlanggu adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah
    6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC – 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kecamatan DLANGGU Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai IKM		90,55	3.224.284.247	92	4.118.590.917	93	4.178.840.917	94	4.270.490.917	95	4.681.590.917	95	19.108.800.707	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			IKM Kecamatan		90,55	2.844.284.247	92	3.678.590.917	93	3.723.840.917	94	3.785.440.917	95	4.176.590.917	95	18.209.197.915	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	82,75	2.844.284.247	82,85	3.678.590.917	83	3.723.840.917	84	3.785.440.917	85	4.176.590.917	85	18.209.197.915	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi													
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	100	100%	15.500.000	10 dokumen	40.000.000	10 dokumen	25.000.000	10 dokumen	35.000.000	10 dokumen	40.000.000	50 dokumen	155.500.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

				sesuai target															
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 dokumen	6 dokumen	8.000.000	6 dokumen	20.000.000	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	15.000.000	7 dokumen	20.000.000	29 dokumen	73.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	35 Laporan	35 dokumen	7.500.000	35 dokumen	20.000.000	30 dokumen	15.000.000	30 dokumen	20.000.000	30 dokumen	20.000.000	160 dokumen	82.500.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran perangkat daerah**	**100%**	**97,27**	**2.472.093.247**	**97,01**	**2.852.190.917**	**97**	**3.178.340.917**	**97**	**3.188.340.917**	**97**	**3.206.590.917**	**97**	**14.898.156.915**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15 orang/pegawai	15 orang/bulan	2.472.093.247	15 orang/bulan	2.852.190.917	15 orang/bulan	3.178.340.917	15 orang/bulan	3.188.340.917	15 orang/bulan	3.206.590.917	15 orang/bulan	14.898.156.915	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IP ASN Perangkat Daerag**	**84**	**83**	**42.000.000**	**81**	**55.000.000**	**81**	**60.000.000**	**81**	**60.000.000**	**81**	**75.000.000**	**81**	**292.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.01.2.05.02	didikan dan Pelatihan awai Berdasarkan as dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Pegawai	15 pegawai	30.000.000	15 pegawai	30.000.000	15 pegawai	30.000.000	15 pegawai	30.000.000	15 pegawai	30.000.000	15 pegawai	150.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	20 stel	15 stel	12.000.000	15 stel	25.000.000	15 stel	30.000.000	15 stel	30.000.000	15 stel	35.000.000	75 stel	132.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan**	**100%**	**100%**	**155.691.000**	**100%**	**199.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**275.000.000**	**100%**	**312.000.000**	**100%**	**1.191.691.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Lampu,TL, saklar dll	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	5 paket	91.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan komp, Laptop, printer, dll.	1 paket	1 paket	51.500.000	1 paket	70.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	95.000.000	5 paket	391.500.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	225.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	2 paket	10.191.000	2 paket	13.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	18.000.000	10 paket	71.191.100	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	n/a	1 paket	3.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	5 paket	48.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, bolpoin, map dll	12 bulan	1 paket	41.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	50.000.000	5 paket	196.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	180.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan**	**100%**	**100%**	**0**	**100%**	**354.400.000**	**100%**		**100%**		**100%**	**300.000.000**	**100%**	**654.400.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 Unit			8 unit	294.400.000					8 unit	300.000.000		594.400.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.07.05	Pengadaaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	4 Unit			3 paket	60.000.000								60.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan**	**100%**	**100 %**	**84.000.000**	**100 %**	**90.000.000**	**100 %**	**108.000.000**	**100 %**	**114.000.000**	**100 %**	**120.000.000**	**100 %**	**516.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	39.000.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	181.200.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	4 orang	12 bulan	54.000.000	12 bulan	54.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	60 bulan	333.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**100 %**	**75.000.000**	**100 %**	**88.000.000**	**100 %**	**102.500.000**	**100 %**	**112.500.000**	**100 %**	**123.000.000**	**100 %**	**502.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 Unit	30.000.000	2 unit	35.000.000	2 unit	45.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	8 unit	185.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	3 unit	30.000.000	3 unit	36.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	50.000.000	15 unit	201.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasrana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.500.000	1 paket	17.500.000	1 paket	18.000.000	5 paket	85.500.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**81%**	**81%**	**40.000.000**	**82%**	**55.000.000**	**83%**	**60.000.000**	**84%**	**65.000.000**	**85%**	**65.000.000**	**85%**	**250.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**

		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**560 pelayanan**	**560 pelayanan**	**40.000.000**	**560 pelayanan**	**55.000.000**	**560 pelayanan**	**60.000.000**	**560 pelayanan**	**65.000.000**	**560 pelayanan**	**65.000.000**	**2.800 pelayanan**	**280.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	560 pelayanan	560 pelayanan	35.000.000	560 pelayanan	55.000.000	560 pelayanan	60.000.000	560 pelayanan	65.000.000	560 pelayanan	65.000.000	2.800 pelayanan	280.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjut**	**100%**	**100%**	**340.000.000**	**100%**	**390.000.000**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**420.000.000**	**100%**	**440.000.000**	**100%**	**1.990.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat**	**36 fasilitasi**	**39 fasili-tasi**	**340.000.000**	**36 fasili-tasi**	**390.000.000**	**37 fasili-tasi**	**400.000.000**	**39 fasili-tasi**	**420.000.000**	**64 fasili-tasi**	**440.000.000**	**190 fasili-tasi**	**1.990.000.000**	**Kec. DLANGGU**	**Kec. DLANGGU**
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata	15 fasilitasi	10 fasilitasi	60.000.000	11 fasilitasi	75.000.000	11 fasilitasi	75.000.000	11 fasilitasi	80.000.000	11 fasilitasi	85.000.000	54 fasilitasi	375.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

			Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa															
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	6 fasili-tasi	60.000.000	6 fasili-tasi	70.000.000	6 fasili-tasi	70.000.000	6 fasili-tasi	75.000.000	6 fasili-tasi	80.000.000	30 fasili-tasi	355.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	7 fasili-tasi	80.000.000	7 fasili-tasi	80.000.000	8 fasili-tasi	85.000.000	8 fasili-tasi	85.000.000	8 fasili-tasi	90.000.000	38 fasili-tasi	420.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	16 fasili-tasi	140.000.000	12 fasili-tasi	165.000.000	12 fasili-tasi	170.000.000	14 fasili-tasi	180.000.000	14 fasili-tasi	185.000.000	68 fasili-tasi	840.000.000	Kec. DLANGGU	Kec. DLANGGU

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 yakni **Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan trasparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran k1 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 yaitu **Mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal

sasaran OPD : 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	**Tahun 1**	**Tahun 2**	**Tahun 3**	**Tahun 4**	**Tahun 5**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,60	93,70	93,80	93,90	94	94,10	
	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan							
	Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		3%	4%	5%	6%	7%	

	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat		81%	82%	83%	84%	85%	
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB VIII
PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2025 - 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Dlanggu.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Dlanggu.

Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2024
CAMAT DLANGGU

Drs. AKHMAD SAMSUL BAKRI ,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700417 199101 1 003